

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, BADAN PENGELOLA SARANA SITUDAUN DAN PROYEK WSLIC-2

A. Lokasi Penelitian

A.1. Kondisi Geografis Desa Situdaun

Desa Situdaun berada di kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat. Desa ini terletak sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Bogor dan 75 km dari ibu kota Jakarta. Secara administrasi desa Situdaun terbagi kedalam 4 (empat) Rukun Warga (RW) yang terbagi lagi kedalam 20 (dua puluh) Rukun Tetangga (RT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Cihideung Udik
- Sebelah Selatan: Desa Gunung Malang
- Sebelah Barat : Desa Cibitung dan Desa Cinangneng
- Sebelah Timur : Desa Purwasari

Luas wilayah desa Situdaun sekitar 329,045 hektar berupa dataran tinggi dengan ketinggian tanah sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Dari luas tanah tersebut, 10,4 hektar digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk, 258 hektar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (seperti sawah dan ladang), sekitar 2 hektar dimanfaatkan sebagai tempat bangunan umum (seperti rumah ibadah, sekolah, kantor desa dan lainnya), 5 hektar untuk empang dan 2 hektar sebagai lahan pemakaman umum.

A.2. Kondisi Demografi Desa Situdaun

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2005 dengan Identifikasi Masalah dan Analisis situasi yang telah dilakukan melalui proyek WSLIC-2 didapatkan data jumlah penduduk desa Situdaun sebanyak 8.235 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4578 jiwa dan perempuan 3657 jiwa, yang terdiri dari 1.700 KK atau 1561 rumah. Berdasarkan klasifikasi kesejahteraan di dapat hasil

prosentase kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu masih cukup besar yaitu sebanyak 974 rumah (62,4%), kelompok masyarakat yang tergolong menengah 446 rumah (28,6%) sedangkan kelompok masyarakat yang tergolong kaya sebanyak 141 rumah (9%). Untuk data lebih lengkap dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kesejahteraan
Desa Situdaun**

RW	RT	Jumlah Penduduk			Tingkat Kesejahteraan (Rumah)			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kaya	Menengah	Mlskin	Jumlah
I	01	210	203	413	13	24	42	79
	02	237	211	448	11	35	45	91
	03	392	254	646	10	17	75	102
II	04	121	111	232	7	42	15	64
	05	225	194	418	11	36	42	89
	06	189	166	355	7	63	42	102
	07	92	87	179	11	26	3	40
	08	189	196	385	10	6	52	68
	09	138	308	446	10	30	29	69
III	10	455	407	862	15	38	70	123
	11	197	183	380	0	0	68	68
	12	338	304	643	3	16	91	110
	13	413	361	774	0	12	107	119
	14	145	148	293	0	17	39	56
IV	15	175	155	330	3	24	34	61
	16	129	124	254	1	15	26	42
	17	146	154	298	4	3	63	70
	18	115	112	227	6	18	58	82
	19	128	140	268	11	11	42	64
	20	202	184	386	4	13	41	58
Jumlah		4578	3657	8235	137	446	974	1561

Sumber: RKM desa Situdaun, 2005

A.3. Kondisi Sosial Budaya Desa Situdaun

Masyarakat desa Situdaun umumnya bersuku Sunda dan terdapat pula suku-suku minoritas seperti Jawa dan Batak. Hampir seluruh masyarakat desa Situdaun memeluk agama Islam sehingga mudah menemukan sarana peribadatan seperti Masjid dan Mushollah.

Organisasi yang ada dimasyarakat beragam, ada yang merupakan hasil bentukan dari pemerintah seperti BPD, LPM dan PKK, dan terdapat pula organisasi ataupun perkumpulan hasil bentukan masyarakat sendiri seperti organisasi pemuda yang bernuansa islami yaitu Pengurus Besar Remaja Masjid Situdaun (PBRMS) dan perkumpulan-perkumpulan pengajian baik dikalangan remaja, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak. Dalam kehidupan sosial budayanya, masyarakat desa Situdaun memiliki karakteristik yang sangat dipengaruhi kehidupan beragama. Hal ini terlihat dari hampir setiap Rukun Tangga, Rukun Warga dan tingkat desa terdapat perkumpulan pengajian yang merupakan salah satu forum menggalang partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

A.4. Kondisi Pendidikan Desa Situdaun

Keadaan pendidikan merupakan gambaran kondisi kualitas dan kuantitas penduduk desa secara umum. Semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif, dan didukung oleh faktor tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki potensi untuk menjadi lebih maju. Berdasarkan data monografi desa diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Situdaun mayoritas pada tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Selain itu masih ada masyarakat desa Situdaun yang tidak memiliki kemampuan baca tulis (buta huruf) hal ini tentu saja merupakan kendala tersendiri terhadap kelancaran proyek yang dilakukan di desa Situdaun. Untuk memperjelas komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa Situdaun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel: 8. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	60
2	Tidak tamat SD/ sederajat	320
3	Tamat SD/ sederajat	2695
4	Tamat SLTP/ sederajat	1556
5	Tamat SLTA/ sederajat	785

6	Tamat D-1	10
7	Tamat D-2	21
8	Tamat D-3	11
9	Tamat S-1	8
	Total	5466

Sumber : Data Monografi Desa Situdaun tahun 2005

Untuk menunjang proses pendidikan di desa Situdaun terdapat beberapa lembaga pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain satu unit Sekolah Taman Kanak-Kanak, lima unit Sekolah Dasar, tiga unit Sekolah Menengah, dan satu unit Sekolah Menengah Atas. Selain sarana pendidikan formal Desa Situdaun memiliki beberapa pondok pesantren yang santrinya tidak hanya berasal dari desa Situdaun akan tetapi berasal dari desa luar. Pondok pesantren (Ponpes) tersebut antara lain Ponpes Nurul Akam, Ponpes Nurul Hidayah, dan Ponpes Nurul Anwar.

A.5. Kondisi Kesehatan Desa Situdaun

Berdasarkan catatan Puskesmas Keliling yang wilayah kerjanya melingkupi desa Situdaun diketahui bahwa desa Situdaun pernah mengalami dua kali wabah (kejadian luar biasa) penyakit muntaber yaitu pada tahun 2000 dan 2002. Setelah adanya proyek WSLIC-2 kondisi kesehatan masyarakat desa Situdaun saat ini secara umum dapat dikatakan cukup baik, dimana tidak terjadi lagi wabah penyakit yang melanda desa tersebut. Adapun jenis penyakit yang saat ini terkadang menyerang anggota masyarakat adalah jenis penyakit ringan seperti flu, sakit kepala dan batuk-batuk.

Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk masyarakat desa Situdaun dapat dikatakan sudah baik dan efektif karena anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akan segera memeriksakan dirinya ke Puskesmas Keliling. Untuk keseluruhan fasilitas kesehatan yang dimiliki desa Situdaun antara lain:

- *Posyandu*, terdapat 12 unit akan tetapi yang masih rutin berjalan sebanyak 10 unit, dua unit yang tidak aktif digabungkan dengan unit posyandu aktif yang terdekat
- *Pos Bersalin* berlokasi di RW 02 yang merupakan satu-satunya fasilitas klinik bersalin Bidan Praktek yang banyak dikunjungi oleh masyarakat desa Situdaun

- *Puskesmas Keliling*, terdapat di RW 04, yang melakukan kegiatannya setiap hari Sabtu pukul 08.00-11.00 WIB di lokasi Pondok Pesantren Nurul Anwar.

A.6 Kondisi Ekonomi Desa Situdaun

Masyarakat desa Situdaun mayoritas mata pencahariannya adalah Petani dan Peternak. Mata pencaharian lain antara lain adalah buruh tani, pedagang, dan pengrajin anyaman bambu dan bunga kering. Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan penduduk dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 9. Jenis Pekerjaan penduduk di Desa Situdaun

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani/peternak	1330
2	Buruh tani	599
3	Pedagang/wiraswasta	267
4	Karyawan Swasta	228
5	Pengrajin	60
6	Supir	45
7	PNS	32
8	Penjahit	30

Sumber: Data Monografi Desa Situdaun, 2005

Kondisi perekonomian masyarakat desa Situdaun pada umumnya tergolong berpenghasilan rendah. Hal ini jelas terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam rangka perencanaan proyek WSLIC-2 yang menggolongkan masyarakat kedalam tiga tingkatan kesejahteraan. Didapatkan hasil presentase kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu masih cukup besar yaitu sebanyak 974 rumah (62,4%), kelompok masyarakat yang tergolong menengah 446 rumah (28,6%), sedangkan kelompok masyarakat yang tergolong mampu sebanyak 141 rumah (9%).

B. Badan Pengelola Sarana

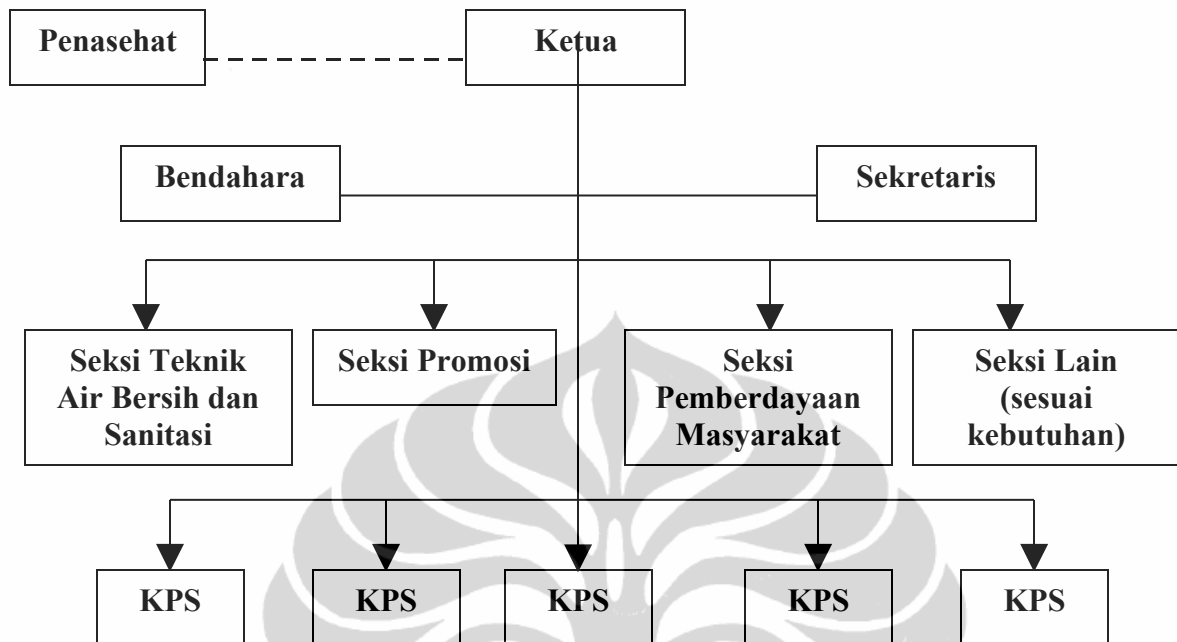
B.1. Profil BPS Proyek WSLIC-2

Sejalan dengan salah satu tujuan dari Proyek WSLIC-2 yakni mewujudkan kesinambungan pasca proyek baik dari aspek kelembagaan, pembiayaan, teknik, lingkungan hidup dan sosial maka dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dan pemeliharaan bagi suatu kegiatan yang memasuki tahap pasca konstruksi dengan membentuk suatu kelembagaan pengelolaan yaitu Badan Pengelola Sarana (BPS). Kelembagaan ini dimaksudkan agar masyarakat semua golongan mengorganisir dirinya kedalam sebuah wadah yang dibentuk secara partisipatif atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, sensitive gender dan sensitive kemiskinan. Lembaga ini diharapkan nantinya memiliki fungsi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Operasional Tingkat Desa Proyek WSLIC-2 disebutkan beberapa arahan dalam pembentukan kelembagaan tersebut antara lain:

- Organisasi operasional dan pemeliharaan dapat berupa organisasi yang sudah terbentuk (TKM) atau merupakan organisasi yang baru sama sekali dimana pengurusnya dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat.
- Bentuk organisasi untuk operasional dan pemeliharaan berbeda sesuai dengan opsi sarana air bersih yang berbeda, misalnya untuk opsi sarana air bersih perpipaan berbeda dengan organisasi untuk opsi sumur gali.
- Susunan organisasi paling tidak terdiri dari: Ketua, Bagian Teknis dan Bagian administrasi.

Dari beberapa arahan diatas jelas bahwa organisasi hasil bentukan proyek WSLIC-2 bersifat cukup fleksibel karena memperhatikan keadaan masyarakat penerima proyek. Hal ini pula secara umum tergambar dari struktur organisasi BPS yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memudahkan kegiatan dilapangan BPS membawahi beberapa Kelompok Pemakai Sarana (KPS) guna mewadahi para pengguna air bersih dan sanitasi berdasarkan keberadaan sarana dan pemakai sarana bermukim. KPS beranggotakan sejumlah keluarga pengguna sarana air bersih. KPS di bentuk seiring dengan pembentukan BPS itu sendiri. Susunan organisasi BPS ini akan terlihat jelas pada bagan dibawah ini:

Gambar 4. Susunan Organisasi BPS Proyek WSLIC-2



Sumber: Buku panduan pasca konstruksi

Secara umum tugas dari Badan Pengelola Sarana dari proyek WSLIC-2 antara lain sebagai berikut:

- Bersama-sama KPS menetapkan pembagian tugas perbaikan sarana air bersih dan sanitasi (teknis)
- Merealisasikan kegiatan pasca konstruksi yang tertuang dalam rencana kerja masyarakat
- Mengelola pemakaian dan pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan dengan masyarakat
- Bersama masyarakat menetapkan penentuan tarif, iuran untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi secara rinci (financial)
- Menghimpun dan mengadministrasikan iuran pengoperasian dan pemeliharaan (institusi)
- Mengorganisir masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana air bersih dan sanitasi
- Mengorganisir kegiatan: pelestarian sumber air bersih, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan sekolah, kegiatan

kesehatan lingkungan di masyarakat dan sekolah termasuk perguliran dana untuk jamban. Menyelenggarakan administrasi organisasi dan administrasi keuangan unit pengelola air bersih dan sanitasi

- Menyelenggarakan rapat, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengurusan unit pengelola air dan penyehatan lingkungan
- Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak lain (pemerintah dan swasta) untuk memperoleh informasi, nara sumber, kerjasama usaha dan jika dimungkinkan menjadi sumber permodalan

Badan Pengelola Sarana berorientasi sosial. Dengan demikian hasil usaha organisasi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengurus bekerja atas dasar sukarela. Bentuk organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi kelembagaan yang ada pada masyarakat.

B.2 Pembentukan Badan Pengelola Sarana Situdaun

Implementasi proyek WSLIC-2 di desa Situdaun diawali dengan kegiatan *Road Show* (sosialisasi) di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang proyek WSLIC-2 kepada seluruh masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan dibantu oleh Tim Fasilitator Kecamatan. Kegiatan *Road Show* yang dilakukan sekurang-kurangnya menyampaikan tiga materi antara lain:

- Gambaran umum proyek WSLIC-2
- Persyaratan untuk dapat ikut serta dalam proyek WSLIC-2
- Perlunya seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan.

Setelah proyek WSLIC-2 tersosialisasi di masyarakat desa Situdaun, aparat desa dan tokoh masyarakat menyelenggarakan Rembug Desa untuk mengetahui sejauh mana minat masyarakat terhadap proyek WSLIC-2. Rembug desa ini terbuka untuk seluruh masyarakat desa. Hal ini dapat terlihat dari cukupnya perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat desa dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kaya miskin, laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Puncak dari proses rembug desa adalah adanya keputusan bersama oleh masyarakat mengenai keinginan memanfaatkan kesempatan

yang ditawarkan oleh proyek WSLIC-2 dengan beberapa ketentuan antara lain harus berpartisipasi penuh dalam keseluruhan proses perencanaan, penyediaan kontribusi masyarakat dan lain-lain, atau memutuskan untuk tidak memanfaatkan yang ditawarkan oleh proyek ini. Desa Situdaun melalui Rembug Desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2003 memutuskan menerima bantuan dari proyek tersebut dengan berbagai persyaratannya yang kesemuanya itu tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Bantuan (SPKMB) yang dikirimkan kepada Ketua Bappeda Kabupaten Bogor sebagai Ketua TKK dan Tembusan ke PMU Kabupaten

Berdasarkan SPKMB yang dikirimkan oleh Desa Situdaun maka PMU Kabupaten Bogor kemudian melakukan evaluasi terhadap kelayakan Desa Situdaun untuk diikutsertakan dalam proyek WSLIC-2. Evaluasi ini dilakukan oleh sebuah Tim Survey yang dibentuk khusus guna melakukan kajian lapangan langsung ke Desa Situdaun, dimana tim tersebut melihat kondisi Desa Situdaun apakah sesuai dengan kriteria lokasi yang dapat dijadikan sasaran proyek dengan menggunakan kriteria dibawah ini:

- a. Derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan adalah Angka Penyakit Diare. Sumber data dan informasi adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa
- b. Tingkat ekonomi kelompok sasaran. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kemiskinan. Data sekunder yang dimiliki oleh kabupaten dengan menggunakan data potensi desa (podes) yaitu swadaya, swakarya dan swasembada.
- c. Pemerataan pelayanan air bersih dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi. Data sekunder yang digunakan adalah yang dimiliki kabupaten ataupun hasil pengamatan langsung dimana cakupan air bersih dan sanitasi dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- d. Kepemilikan sarana air bersih dan sanitasi baik yang masih berfungsi maupun yang sudah tidak berfungsi lagi. Indikator yang digunakan adalah:
 - Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang sudah tidak berfungsi

- Dipertimbangkan kemungkinan adanya proyek lain yang sejenis di daerah tersebut dan potensi sumber air yang ada.
- Faktor lain yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan di lapangan seperti faktor situasi dan kondisi lokasi, daya jangkau, keamanan, dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan survey oleh Tim Survey dari proyek WSLIC-2 desa Situdaun diumumkan oleh PMU Kabupaten Bogor sebagai salah satu desa yang diprioritaskan untuk dilibatkan dalam proyek WSLIC-2 pada tahun anggaran 2004/2005. Pada kenyataannya rencana proyek untuk desa-desa tahun anggaran 2004/2005 mengalami kemunduran satu tahun hal ini disebabkan dari pihak PMU Pusat yang belum dapat menyediakan Fasilitator untuk masyarakat. Dengan demikian desa-desa sasaran proyek tahun anggaran 2004 termasuk desa Situdaun menjadi desa-desa sasaran proyek WSLIC-2 tahun 2005/2006.

Selain persyaratan dan kriteria diatas, desa lokasi proyek WSLIC-2 termasuk desa Situdaun harus menyanggupi persyaratan antara lain:

1. Bantuan diterima berdasarkan pada keinginan, kemauan dan kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat desa
2. bantuan hanya akan digunakan untuk pengadaan sarana air bersih, sanitasi dan pengembangan perilaku hidup sehat di sekolah dan masyarakat.
3. masyarakat dibantu oleh Tim Fasilitator Masyarakat akan berpartisipasi dalam membuat Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)
4. masyarakat akan membentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) secara partisipatif dan wakil-wakil yang duduk didalamnya mencerminkan keseimbangan gender dan sosial
5. Masyarakat akan berpartisipasi penuh dalam seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dan kelangsungan proyek
6. menyediakan kontribusi pada proyek sebesar 16 % berupa material dan atau tenaga dan 4% tunai dari besar biaya proyek
7. membayar iuran untuk pemeliharaan sarana yang dibangun dan menunjang kegiatan lainnya.

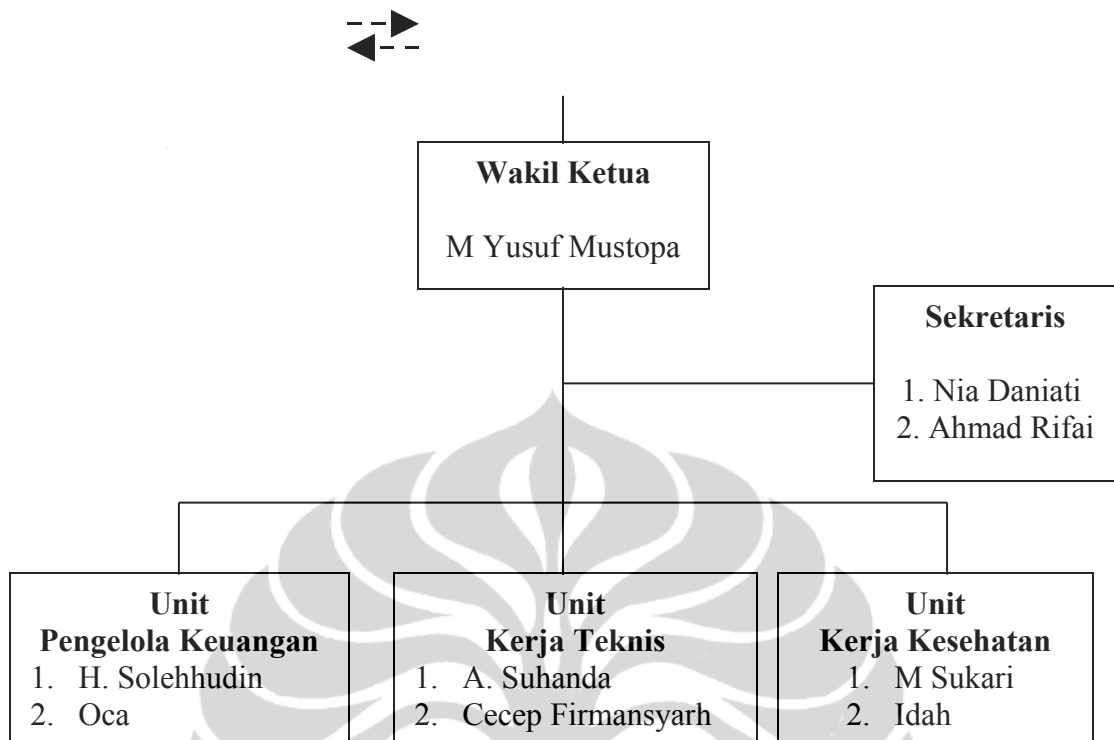
8. mengelola dana secara terbuka dan diketahui seluruh masyarakat
9. bersedia menerima pembatalan apabila dalam jangka waktu 15 bulan setelah dinyatakan sebagai desa terpilih, tidak dapat merealisasikan kontribusi sebagaimana tercantum pada butir 6 dan menghasilkan RKM sebagaimana tercantum pada butir 3.

Dengan memperhatikan persyaratan diatas, bahwa setiap desa yang menerima proyek WSLIC-2 akan membentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) secara partisipatif dan wakil-wakil yang duduk didalamnya mencerminkan keseimbangan gender dan sosial maka pada tanggal 2 Agustus 2005 dibentuklah TKM desa Situdaun yang keanggotaannya berasal dari masyarakat desa Situdaun sendiri. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan proyek WSLIC-2 yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik proyek, sehingga TKM merupakan pelaksana kegiatan proyek di tingkat desa.

Proses pembentukan TKM di desa Situdaun difasilitasi oleh Perangkat Desa Situdaun dan dibantu Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) dalam sebuah Rembug Desa yang dihadiri oleh anggota masyarakat desa Situdaun. Rembug Desa ini dihadiri oleh 128 orang anggota masyarakat perempuan dan 169 orang anggota masyarakat laki-laki. Dalam prosesnya TFM memberikan pemahaman bahwa keanggotaan TKM harus terdiri dari masyarakat yang dipilih secara demokratis dan memperhatikan kesetaraan gender dan sosial. Pemilihan anggota TKM dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta Rembug Desa yang hadir, dimana sebelumnya diusulkan dulu calon-calon anggota TKM dari setiap Rukun Warga. Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih merupakan calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua. Sedangkan anggota TKM dan struktur TKM dimusyawarahkan kembali antara Ketua dan Wakil TKM, Perangkat Desa, Badan Perwalikan Desa, dan anggota masyarakat yang hadir. Untuk lebih jelasnya anggota masyarakat yang terpilih menjadi anggota TKM terangkum dalam struktur organisasi TKM Desa Situdaun yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Kerja Masyarakat Desa Situdaun





Sumber: RKM Desa Situdaun 2005

Untuk lebih mengukuhkan peranan TKM proyek WSLIC-2 dalam masyarakat maka pada tanggal 27 September 2005 Bupati Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 440/305/Kpts/Huk/2005 tentang Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM) Proyek Water and Sanitation for Low Income Communities II (WSLIC-II) Desa Bojong Murni dan Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi, Desa Kopo Kecamatan Cisarua, Desa Cisolada Kecamatan Cigombong, Desa Tangkil Kecamatan Caringin, Desa Petir Kecamatan Dramaga, Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg, Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya, dan Desa Sibanteng Kecamatan Leuwisadeng Tahun 2005. Dengan demikian TKM selain merupakan perwakilan masyarakat yang merupakan pemilik dan pelaksana kegiatan proyek di desa, dengan SK Bupati ini maka TKM Situdaun telah memiliki legitimasi untuk menjadi pelaksana proyek di tingkat desa.

Tugas utama TKM dalam proyek WSLIC-2 adalah sebagai pelaksana proyek di tingkat masyarakat, dimana hal ini berarti bahwa TKM mempunyai tanggungjawab sebagai perwakilan masyarakat desa dalam perencanaan dan implementasi proyek. Sehubungan dengan berakhirnya proyek (tahap pasca

proyek), maka peran TKM menjadi tidak relevan lagi dengan kebutuhan yang ada karena pada tahap ini diperlukan suatu organisasi untuk memelihara hasil-hasil dari proyek untuk menjamin kesinambungan pasca proyek. Sehingga dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun melalui proyek perlu dibentuk organisasi yang bertugas mengelola hasil proyek yang berbentuk Badan Pengelola.

Peralihan tanggungjawab pelaksanaan proyek dari TKM ke Badan Pengelola mekanismenya diserahkan kepada masyarakat dimana masyarakat yang memutuskan apakah struktur TKM tetap dipertahankan hanya berubah fungsi menjadi Badan Pengelola ataukah membubarkan TKM dan membentuk kembali struktur yang baru yang bertugas mengelola sarana pasca konstruksi. Berkaitan dengan hal ini pemegang proyek WSLIC-2 hanya memberikan pilihan kepada masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada halaman 15 bab II. Mengingat panjangnya tahapan proyek WSLIC-2 yang melibatkan masyarakat dengan tujuan menciptakan kesinambungan proyek maka mekanisme peralihan TKM menjadi Badan Pengelola cukup rentan terhadap upaya mewujudkan kesinambungan proyek dimana masyarakat diberikan pilihan tanpa adanya jaminan dari aturan pemegang proyek untuk berupaya tetap memasukkan unsur TKM didalam Badan Pengelola karena perlu disadari bahwa kesinambungan tahapan implementasi proyek sangat berpengaruh terhadap upaya kesinambungan pasca proyek.

Untuk Desa Situdaun peralihan TKM menjadi Badan Pengelola masyarakatnya memilih untuk tetap mempertahankan orang-orang yang ada di dalam TKM sehingga kemungkinan besar adanya jaminan kesinambungan dari implementasi proyek ke tahapan pasca proyek. Badan Pengelola di Desa Situdaun bernama Badan Pengelola Sarana Situdaun dibentuk menjelang selesainya pembangunan fisik konstruksi sarana air bersih pada tanggal 8 Maret 2006 melalui suatu pertemuan di tingkat desa. Berdasarkan dokumen notulen rapat desa Situdaun diketahui bahwa pertemuan ini diikuti oleh 112 orang anggota masyarakat desa Situdaun, yang terdiri dari 80 orang laki-laki dan 32 orang perempuan yang merupakan perwakilan warga dari seluruh RW di desa Situdaun. Sehingga dapat dikatakan Badan Pengelola yang telah dibentuk

tersebut mendapat persetujuan dari masyarakat desa Situdaun. Di samping itu dapat diketahui dalam keanggotaan Badan Pengelola Sarana Situdaun seluruh anggotanya adalah mantan anggota TKM Situdaun. Dalam Proyek WSLIC-2 anggota TKM menjadi anggota BPS merupakan hal yang dimungkinkan karena ini sepenuhnya tergantung hasil musyawarah masyarakat desa. Adapun susunan keanggotaan BPS Situdaun adalah sebagai berikut:

- Penasehat : Kepala Desa Situdaun.
BPD Desa Situdaun
- Ketua : Aris Munandar
- Sekretaris : M Sukari
- Bendahara : Oca
- Bidang Teknik : Cecep Firmansyah
- Bidang Pemberdayaan : Hamdani
- Bidang Kesehatan : Nia Daniati

BPS Situdaun beranggotakan seluruh masyarakat pengguna air bersih baik yang menggunakan Keran Umum (KU) maupun masyarakat yang memiliki sambungan langsung ke rumah (SR). Untuk masyarakat pengguna Keran Umum dikelompokkan ke dalam Kelompok Pengguna Sarana (KPS). KPS ini terdiri dari sejumlah keluarga pengguna sarana air bersih yang keberadaannya saling berdekatan dengan Keran Umum. Setiap KPS ini biasanya memiliki koordinator yang bertugas mengorganisir kegiatan anggotanya terutama dalam hal pemeliharaan sarana dan iuran setiap anggota. BPS Situdaun ini bersifat otonom dibawah pemerintah desa yang bersifat koordinasi.

C. Proyek Second Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2)

B.1. Profil Proyek WSLIC-2

Pada tahun 1993 pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank dunia mengadakan proyek *The Water Supply and Sanitation for Low Income Communities* (WSSLIC). Misi dari proyek ini adalah mengurangi kemiskinan

dengan membantu orang miskin memperoleh akses yang berkelanjutan terhadap sarana air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan proyek WSSLIC dilakukan di enam propinsi yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, dan berakhir pada tahun 1999. Setelah itu pada tahun 2001 dilaksanakan proyek *The Second Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC-2). Proyek ini tersebar di 7 Provinsi meliputi 34 kabupaten dan 2000 desa dengan jangka waktu 5 tahun dari 2001 – 2006. Pada pelaksanaannya khusus untuk propinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan dikarenakan dimulai tahun 2004 maka proyek diperkirakan akan berakhir pada tahun 2008. Adapun lokasi proyek dapat dilihat pada tabel I halaman sebelumnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini sebesar US\$ 106,7 juta yang bersumber dari Pemerintah RI (Pusat dan Daerah) sebesar US\$ 12,2, Hibah (Grant) dari Pemerintah Australia sebesar US\$ 6,5 juta, pinjaman Bank Dunia US\$ 77,4 juta dan Kontribusi Masyarakat US\$ 10,6 juta (berupa uang cash US\$ 2,12 juta dan in-kind atau natura US\$ 8,48 juta). Seluruh pinjaman dari Bank Dunia tersebut merupakan International Development Assistance (IDA) yang tidak berbunga dengan jangka waktu pengembalian 35 tahun dengan masa tenggang pembayaran cicilan (grace period) 10 tahun.

B.2. Tujuan, Komponen, dan Pendekatan Proyek WSLIC-2

Proyek WSLIC-2 memiliki tujuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia akan tetapi lebih jauh lagi seperti yang dituangkan dalam buku petunjuk pelaksana manajemen proyek WSLIC-2 yakni bahwa tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan status kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah di pedesaan melalui tujuan khusus antara lain:

1. Perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat

4. Kestinambungan pembangunan masyarakat secara partisipatif

Dengan melihat tujuan proyek di atas maka disadari akan kebutuhan upaya untuk mencapainya. Upaya-upaya tersebut dirumuskan melalui berbagai kegiatan proyek yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) komponen kegiatan yang memiliki sifat dan tujuan yang sama. Komponen kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat, yang mencakup:
 - a. Peningkatan kemampuan TFM, TKM, masyarakat, melalui pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam hal:
 - Identifikasi masalah dan persiapan pemberdayaan masyarakat dibidang air bersih dan penyehatan lingkungan
 - Pelaksanaan tanggungjawab manajemen organisasi dan keuangan
 - Pengoperasian dan pemeliharaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman
 - b. Pelatihan bagi aparat kabupaten dan kecamatan serta LSM dalam upaya mengembangkan keterampilan teknis dibidang pengelolaan pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, perencanaan dan pemeliharaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman serta pemberdayaan masyarakat agar dapat berinisiatif
 - c. Bantuan teknis (Konsultan) untuk pelaksana tingkat kabupaten dan kecamatan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menyusun prosedur pengoperasiaan yang tepat sehingga dengan mudah dapat tanggap terhadap kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat tentang program air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
 - d. Bantuan teknis (Konsultan) kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten mengenai program air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman guna meningkatkan kemampuan dibidang perencanaan program, pelaksanaan dan monitoring, termasuk pengembangan mekanisme dalam pengambilan keputusan dan proses keuangan secara transparan.

2. Komponen B. Peningkatan Program Kesehatan dan Sanitasi, yang mencakup:
 - a. Pengadaan Konsultan, pelatihan dan materi bagi guru dan Kepala Sekolah Dasar guna pengembangan program promosi kesehatan di sekolah dan penyehatan lingkungan permukiman serta penggabungan beberapa program lainnya untuk dijadikan materi pendidikan sekolah
 - b. Pengadaan Konsultan dan pelatihan bagi petugas kesehatan, guru, aparat dan LSM untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan promosi hygiene dan sanitasi serta kegiatan yang lain yang tidak terjangkau oleh masyarakat.
 - c. Ketersediaan dana bantuan bagi Tim Kerja Masyarakat untuk melaksanakan program kesehatan dan sanitasi melalui partisipasi masyarakat dan program-program di Puskesmas lainnya.
 - d. Pengadaan Konsultan untuk membantu Departemen Kesehatan dalam melakukan monitoring dampak terhadap kesehatan sebagai akibat dari intervensi proyek

3. Komponen C. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang mencakup:
 - a. Bantuan teknis (Pendamping) bagi masyarakat untuk pengembangan berbagai opsi teknis dan tingkat pelayanan serta biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih
 - b. Pendamping teknis untuk membantu keluarga/kelompok sasaran dan berpartisipasi dalam melakukan evaluasi terhadap opsi dan rencana pembangunan sarana air bersih
 - c. Penyediaan bantuan bagi Tim Kerja Masyarakat untuk membuat rancang bangun, membangun sarana air bersih serta program kesehatan ditingkat masyarakat melalui proses partisipasi
 - d. Penyediaan pelatihan dan pendamping untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan terhadap sarana yang telah dibangun.
 - e. Pilihan/opsi teknis sarana air bersih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Pilihan Teknologi Sistem Penyediaan Air Bersih

Tipe	Deskripsi	Layanan
------	-----------	---------

Tipe I Sistem Aliran Gravitasi Perpipaan		
Kecil	Skala Kecil: sumber dari mata air, gravitasi, tidak perlu pengolahan, layanan dengan hidran umum (HU) atau kombinasi HU dan sambungan rumah (SR)	Untuk jumlah penduduk 750-2.500 jiwa
Sedang	Skala Sedang: sumber dari mata air, gravitasi, tidak perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 1.500-4.000 jiwa. Sistem ini diperlukan persetujuan khusus
Besar	Skala Besar: sumber dari mata air, gravitasi, tidak perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 2.500-10.000 jiwa
Tipe II Sistem Pompa dengan Perpipaan		
Kecil	Skala Kecil: sumber dari mata air, energi pompa, tidak perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 750-2.500 jiwa
Sedang	Skala Sedang: sumber dari mata air, energi pompa, tidak perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 1.500-4.000 jiwa. Sistem ini diperlukan persetujuan khusus
Besar	Skala Besar: sumber dari mata air, energi pompa, tidak perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 2.500-10.000 jiwa
Tipe Lain Termasuk Sistem Non Perpipaan		
Tipe III	Sumber air tanah dangkal, sumur gali, sumur pompa tangan, atau energi pompa sederhana	1 unit sumur melayani 3-5 keluarga
Tipe IV	Sumber air tanah dalam, sumur dalam, pompa dengan tampungan, disertai sistem distribusi perpipaan layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 750-2.500 jiwa. Sistem ini diperlukan persetujuan khusus
Tipe V	Sumber air permukaan, sistem gravitasi, perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 750-2.500 orang
Tipe VI	Sumber air permukaan, dengan sistem pemompaan perlu pengolahan, layanan dengan HU atau kombinasi HU dan SR	Untuk jumlah penduduk 750-2.500 jiwa. Sistem ini diperlukan persetujuan khusus
Tipe VII	Sumber air hujan yang memungkinkan, penampung air hujan	1 penampung air hujan, untuk 2-3 rumah tangga.

Sumber: Petunjuk Pelaksana Operasional Tingkat Desa, CPMU WSLIC-2, 2002

f. Pilihan/opsi teknis sarana sanitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Pilihan Teknologi Sistem Sarana Sanitasi

Tipe	Deskripsi	Layanan
Cubluk tanpa penutup/ dinding	Digunakan pada ketersediaan air bersih terbatas	1 unit untuk 1 keluarga
Cubluk dengan penutup	Sistem yang dapat terjangkau oleh masyarakat miskin	1 unit untuk 1 keluarga
Cubluk tunggal dengan sistem ventilasi	Digunakan pada ketersediaan air bersih terbatas	1 unit untuk 1 keluarga
Cubluk dengan penggelontor	Harus mendapatkan layanan air bersih memadai	1 unit untuk 1 keluarga
Septik Tank	Digunakan pada sistem penyediaan air bersih dengan sambungan rumah	1 unit untuk 1 keluarga
Sewerage Komunal	Biaya tinggi, digunakan untuk daerah dengan kepadatan tinggi	Pengguna terbatas tidak tergantung topografi

Sumber: Petunjuk Pelaksana Operasional Tingkat Desa, CPMU WSLIC-2, 2002

4. Komponen D. Manajemen Proyek

Komponen manajemen proyek meliputi kegiatan pengelolaan proyek yang mencakup: administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek serta penyediaan peralatan dan fasilitas kantor, supervisi, pembinaan, gaji upah, honorarium, uang lembur, perjalanan, peralatan, biaya operasional kantor, bahan dan lain sebagainya.

Pendekatan dalam proyek WSLIC-2 antara lain *demand responsive approach* (pendekatan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta kepekaan terhadap orang miskin.

Pendekatan *demand responsive approach* digunakan pada setiap tahapan proyek seperti pada tahap sosialisasi program (road show) dimana

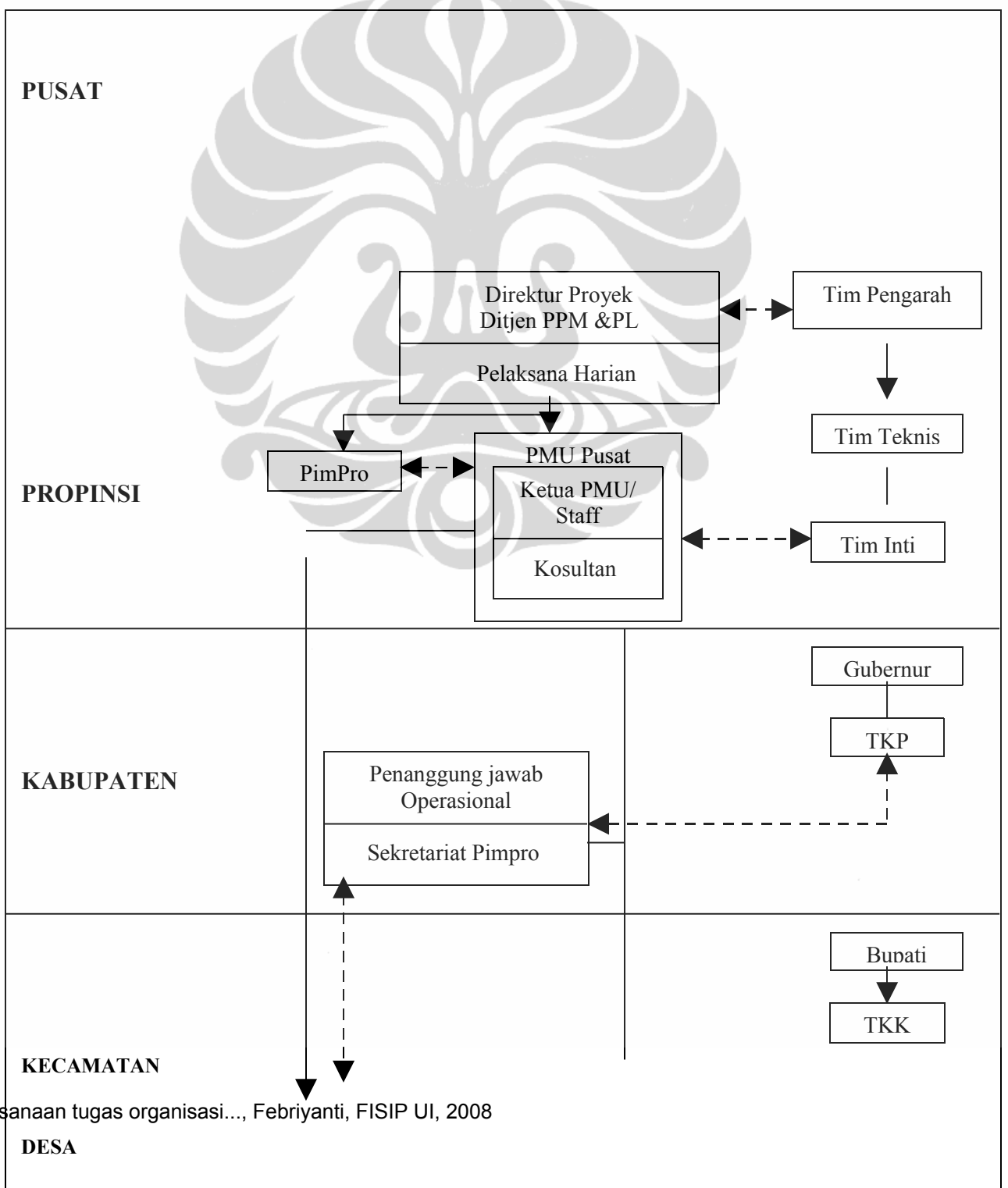
masyarakat diberikan kesempatan untuk menyadari apakah mereka memang membutuhkan proyek tersebut atau tidak. Dibutuhkan keputusan bersama oleh masyarakat mengenai keinginan memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh proyek WSLIC-2 melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Bantuan. Pendekatan ini juga terlihat pada saat pemilihan teknologi yang akan digunakan masyarakat dalam proyek ini. Teknologi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sumberdaya (tenaga kerja, keuangan, material) yang ada.

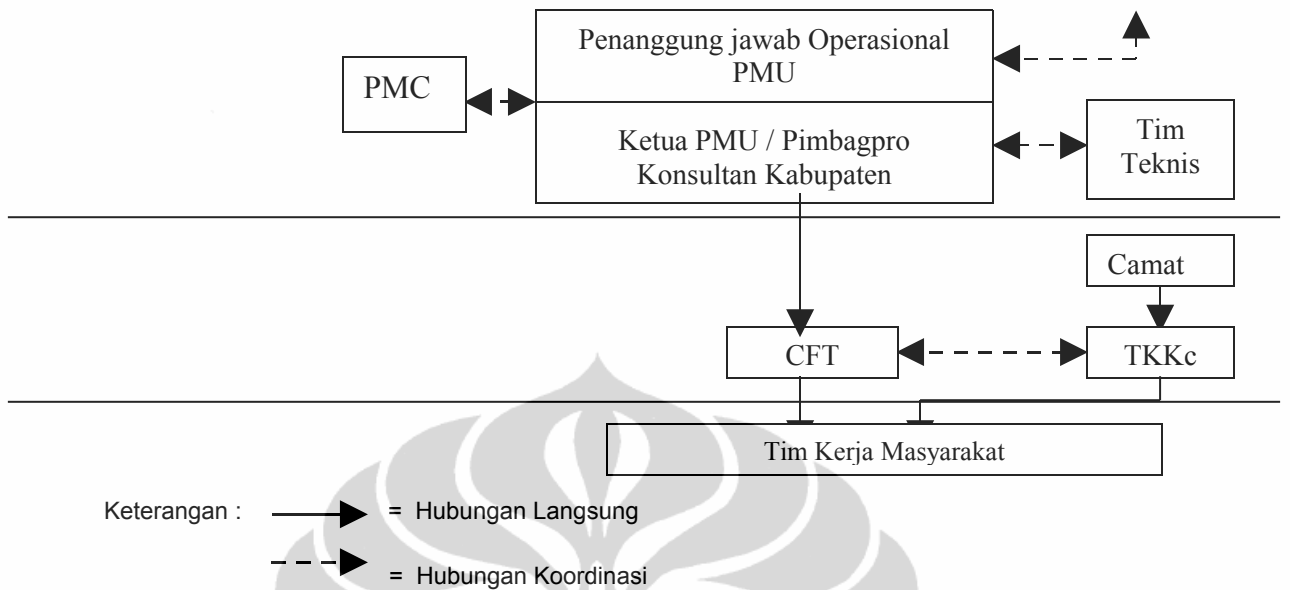
Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencoba menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kegiatan ditingkat desa. Pendekatan ini diterapkan melalui metode *Methodology for Participatory Assessment (MPA)* dan *Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST)*. Metode ini pada dasarnya menitikberatkan pada pelibatan seluruh masyarakat dalam berbagai kegiatan mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana serta monitoring dan evaluasi. MPA digunakan dalam membuat rencana kerja di tingkat masyarakat, khususnya pada penilaian kebutuhan terhadap sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan PHAST digunakan dalam menyusun rencana kerja khususnya dalam melakukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dikalangan masyarakat dan sekolah.

Pada proyek WSLIC-2 terdapat pula pendekatan yang memperhatikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta kepekaan terhadap orang miskin. Melalui proyek ini diharapkan laki-laki, perempuan, kaya dan miskin terlibat dalam menentukan kebutuhan mereka dan dalam pengambilan keputusan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

B.3. Struktur Organisasi Proyek WSLIC-2

Dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan Manajemen proyek WSLIC-2 memuat struktur organisasi proyek WSLIC-2 seperti yang tergambar dibawah ini





Dari gambar diatas dapat terlihat pada tingkat pusat executing agency proyek ini adalah Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2M-PL), Departemen Kesehatan. Di tingkat pusat dibentuk pula Tim Pengarah Pusat (TPP) yang beranggotakan para eselon I dari Depkes, Depdagri, Departemen Kimpraswil/PU, Depkeu dan Depdiknas, yang diketuai oleh Deputy IV Bappenas. Adapun pengelola WSLIC-2 di tingkat pusat adalah *Project Management Unit* (PMU) pusat yang bertanggungjawab pengelolaan administrasi secara keseluruhan dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan proyek terhadap PMU pusat diberikan oleh Tim Konsultan Pusat.

Penanggung jawab operasional proyek di propinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan propinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek WSLIC-2 serta melakukan monitoring pelaksanaan proyek yang dilakukan PMU/Pimbagpro WSLIC-2 Kabupaten.

Pelaksana proyek di tingkat Kabupaten adalah *Project Management Unit* (PMU) Kabupaten, dimana ketua PMU Kabupaten sekaligus sebagai pemimpin bagian proyek yang berasal dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten. Tugas dan tanggung jawab PMU Kabupaten adalah menangani manajemen

pelaksanaan proyek di Kabupaten, antara lain mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan proyek, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, dan membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan masyarakat.

Di tingkat desa dibentuk suatu Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secara demokratis dan dengan memperhatikan kesetaraan gender (perempuan dan laki-laki) dan sosial (kaya-miskin). Dalam pembentukan TKM terdapat ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Operasional Tingkat Desa antara lain yaitu:

- Pembentukan TKM dilakukan secara musyawarah sesuai pilihan dari masyarakat.
- Anggota TKM harus mencerminkan perwakilan dari seluruh dusun yang merupakan gabungan unsur dari masyarakat yaitu kaya miskin, laki-laki dan perempuan
- Agar suara orang miskin dapat didengar maka sebaiknya ada keterwakilan kaum miskin dalam anggota TKM
- Agar suara perempuan bisa didengar maka sebaiknya jumlah anggota TKM perempuan minimal sebesar 1/3 dari jumlah seluruh anggota TKM.